

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah :**

Krimea merupakan sebuah semenanjung yang terletak di bagian timur, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hitam, sebelah utaranya berhungungan dengan Ukraina, sedangkan di sebelah timur semenanjung ini hampir menyambung dengan daratan Rusia. Secara de juree (hukum) Krimea merupakan wilayah dari negara Ukraina, namun secara darah keturunan wilayah ini sangat erat hubungannya dengan Rusia, karena sekitar 60 persen dari total penduduk Krimea berdarah Rusia.

Rusia pernah menguasai Krimea pada abad ke - 18 sampai abad ke – 20. Pada tanggal 19 Februari 1954, Presidium tertinggi Uni Soviet mengeluarkan dekrit yang menyerahkan Krimea kepada Ukraina sebagai hadiah menandai 300 tahun Ukraina menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia. Sekjen Partai Komunis Uni Soviet waktu itu adalah Nikita Khrushchev, yang merupakan keturunan Ukraina. Pemberian hadiah tersebut tidak terlalu menjadi masalah sampai Uni Soviet Runtuh tahun 1991 dan Krimea menjadi bagian dari Ukraina yang merdeka.<sup>1</sup>

Saat Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 tersebut, baik Rusia maupun Ukraina sama – sama menginginkn Krimea. Namun pada Desember 1991, Rakyat

---

<sup>1</sup>Hadiah Dari Khrushcheves, Kompas, Rabu 5 Maret 2014

Krimea memilih untuk bergabung dengan Ukraina. Setahun kemudian, 1992, para politisi pro Rusia di Krimea berkampanye menginginkan bergabung dengan Rusia, kemudian masalah ini dapat diakhiri pada tahun 1997 dengan ratifikasi Kesepakatan Persahabatan , Kerjasama, dan Kemitraan, yang menegaskan Moskow mengakui integrasi wilayah dan perbatasan Ukraina. Dengan kata lain, kedaulatan penuh Ukraina atas Krimea dan Sevastopol, pangkalan AL Rusia di Krimea.<sup>2</sup>

Memasuki tahun 2014 lalu kisruh antara Ukraina dan Rusia kembali mengeluap terkait kasus Krimea ini, bermula setelah tersingkirnya Presiden Ukraina yang pro Rusia yaitu Victor Yanukovych oleh pihak oposisi barat, Presiden Victor Yanukovych merupakan presiden yang menang dalam pemilihan tahun 2010, dengan dukungan kuat yang berasal dari dari Republik Otonom Krimea dan Ukraina bagian selatan serta timur.

Kisruh di Ukraina bermula pada 21 November 2013 setelah seruan demonstrasi yang meminta integrasi yang lebih erat dengan Uni Eropa meluap. Seruan demonstrasi ini meluas menjadi seruan agar Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dan pemerintahannya mengundurkan diri.<sup>3</sup> Kemudian digantikan Oleksander Turchinov yang kini menjadi presiden sementara Ukraina, sedangkan Viktor Yanukovych sehari setelah di gulingkannya memilih melarikan diri ke

---

<sup>2</sup> Krisis Ukraina, Malaikat Dari Crimea, Oleh : Trias Kuncahyono, Kompas, Selasa, 4 Maret 2014

<sup>3</sup> <http://www.reuters.com/article/2013/12/12/us-ukraine-idUSBRE9BA04420131212>, Kiev protesters gather, EU dangles aid promise, by Richard Balmforth, KIEV, Thu Dec 12, 2013, diakses tanggal 3 Maret 2014

Rusia. Hal ini meresahkan warga masyarakat yang pro Rusia dan pemerintahan Rusia sendiri, dimana bila presiden pro Rusia Viktor Yanukovych terguling maka masyarakat pro Rusia takut akan mendapatkan sikap diskriminasi dari pemimpin yang pro barat, tergulingnya Presiden pro Rusia ini juga ditakutkan dapat mengganggu kepentingan Rusia di Ukraina.

Pada tahun 2009 Presiden Ukraina pro barat, Viktor Yunshenko, memiminta gara Rusia meninggalkan pengkalannya Armada Laut Hitamnya yang berada di Sevastopo yang terletak di pantai selatan Krimea, namun pada tahun 2010 ketika presiden pro Rusia Viktor Ynukovych memimpin, ia menyetujui untuk memperpanjang sewa Rusia sampai tahun 2042. Dengan tergulingnya presiden Viktor Yanukovych menimbulkan kekhawatiran kembali pada Rusia, Rusia khawatir bila ia diusir dari pelabuhan tersebut oleh pemerintahan baru Ukraina yang pro Barat. Ukraina sebenarnya telah menjadi incara Rusia untuk menjalin kerjasama dalam pembentukan blok ekonomi Eurasia, saingan dari Uni Eropa. Namun semua gagal setelah presiden Victor Yanukovych terguling.

Dalam setiap kebijakannya Presiden Victor Yanukovych pun lebih cenderung pro terhadap Rusia, diantaranya ialah pada tanggal 21 April 2010 Victor Yanukovych menandatangani perjanjian Naval Base yang isinya Rusia dapat memperpanjang sewa Sevastopo yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Rusia yang berada di Krimea, sepanjang 25 tahun kedepan sampai tahun 2024, dan tambahan ekstra 5 tahun, sampai 2047, dengan imbalan Ukraina mendapatkan kontrak multi diskon dalam pembelian gas alam Rusia.

Pada 17 Desember 2010 Victor Yanukovych menandatangani dana talangan sebesar US\$ 15 miliar dari Rusia, untuk menanggulangi krisis ekonomi di eropa, dan mengabaikan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa yang akan dilakukan di Eastern Partnership Summit di Vilnius, Lithuania. Kebijakan penundaan Perjanjian Asosiasi Ukraina – Uni Eropa ini lah yang menjadi titik puncak kemarahan rakyat Ukraina di Kiev terhadap Victor Yanukovych, yang mana sejak awal kepemimpinannya sudah terlihat keberpihakannya terhadap Rusia.

Masyarakat di Kiev lebih banyak mewakili kelompok pro Uni Eropa, sedangkan masyarakat pro Rusia berada di Semenanjung Krimea, di kota ini terjadi aksi protes pro Rusia. Demonstran dipimpin oleh anggota Parlemen Ukraina yang pro Rusia meminta untuk di selamatkan oleh pihak Rusia, masyarakat Krimea menginginkan agar Rusia membela mereka seperti yang dilakukan Rusia pada tahun 2008, saat Rusia mengirim pasukan dalam jumlah besar ke wilayah Ossetia Selatan untuk melindungi warga Rusia di wilayah itu

Setelah presidn Viktor Yanukovych dukungan Rusia di gulingkan oleh parlemen Ukraina pada tanggal 22 Februari 2014. Pasca digulingkannya Presiden pro Rusia Victor Yanukovych, Presiden Rusia, Valdimir Putin mengambil langkah gesit dengan menuntut persetujuan Parlemen Rusia untuk menginvasi Ukraina dan pada tanggal 1 Maret 2014 Putin berhasil mendapat persetujuan Parlemen, Rusia melakukan manuver militer dengan menerjunkan ribuan tentara ke wilayah otonom Krimea. Manuver ini langsung dikecam oleh Barat. Barat

menganggap langkah Rusia tersebut sebagai agresi atas kedaulatan sah Ukraina dan melanggar hukum internasional.<sup>4</sup>

Mayarakat pro Rusia di Krimea menuntut untuk dilakukannya referendum. Sebanyak 1,5 juta rakyat Krimea mengikuti referendum untuk menentukan masa depan mereka, pada tanggal 16 Maret 2014, rakyat Krimea diberi dua opsi dalam referendum itu, yakni bergabung dengan Rusia atau tetap bersama Ukraina, namun dengan otonomi luas. Hasil dari referendum tersebut menyebutkan 70 persen warga Krimea ingin bergabung dengan Rusia, dan 11 persen menginginkan tetap bergabung kedalam kedaulatan Ukraina.

Keputusan referendum tersebut dianggap sebagai sebuah keputusan yang ilegal, dan dianggap sebagai sebuah upaya aneksasi yang dilakukan oleh Rusia. Banyak negara yang tidak mengakui bahkan mengecam hasil referendum tersebut, namun Valdimir Putin tidak gentar bahkan ia tetap menandatangani Undang - undang yang mengesahkan Crimea bergabung menjadi bagian dari Rusia pada tanggal 21 Maret 2014.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling menentang hasil refrenfum tersebut, sebagai bentuk ketidak setujuan Amerika Serikat terhadap referendum yang di nilai illegal tersebut Amerika Serikat memberikan sangksi berupa embargo ekonomi kepada Rusia, dengan maksud untuk melemahkan Rusia dari dalam sector ekonominya, bahkan Amerika Serikat menggandeng Uni Eropa dengan maksud untuk mempersempit mitra dagang Rusia, yang mana Uni Eropa

---

<sup>4</sup> Aneksasi Krimea Oleh Rusia, Kedaulatan Rakyat, oleh Chusnan Maghris, alumnus Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 27 Maret 2014

merupakan mitra dagang terbesar Rusia, maka dengan demikian Rusia akan kehilangan pasarnya di Uni Eropa.

Menanggapi hasil referendum atas wilayah Krimea tersebut, Amerika Serikat dan Uni Eropa pada tanggal 17 Maret 2014 mengesahkan sanksi untuk Rusia berupa embargo. Embargo yang di berikan oleh Amerika Serikat ke Rusia tersebut berupa : Larangan Visa dan Pembekuan Aset bagi pejabat dan pengusaha Rusia, embargo di sector Sanksi di sector financial, industri dan pertahanan Rusia, serta di keluarkannya Rusia dari keanggota G-8.

Rusia pun pada akhirnya harus membayar mahal upaya agresinya tersebut dengan rontoknya nilai mata uang rubel terhadap euro dan dolar sebagai akibat dari embargo ekonomi tersebut. Untuk pertama kalinya rubel turun dibawah 50 rubel terhadap euro, dengan 51,20 rubel setara dengan 1 euro, kemerosotan nilai tukar pun terjadi pada nilai tukar rubel pada dollar AS dimana nilai 37 rubel setara dengan 1 dollar AS.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka permasalahan yang coba di rumuskan oleh penulis adalah :

*“Bagaimana strategi Rusia menghadapi embargo AS pasca referendum Krimea tahun 2014 ?”*

---

<sup>5</sup> Rubel Rusia Langsung Rontok Semua Indikator Finansial Kremlin Merosot, Kompas, Selasa, 4 Maret 2014

### **C. Landasan Teori :**

Untuk melihat suatu permasalahan yang terjadi antar negara tersebut, perlu menggunakan pendekatan yang mampu menjelaskan persoalan tersebut dengan baik. Menurut Wight teori merupakan penjelasan mengenai hukum yang mengidentifikasi hubungan yang serupa atau yang dimungkinkan terjadi. Kemudian menurut Hollis dan Smith teori berfungsi untuk mengintisarikan, menggeneralisasikan dan menghubungkan.<sup>6</sup>

Secara spesifik Mc Cain dan Segal mendefinisikan teori sebagai berikut: "Serangkaian sistem yang saling berkaitan, yang terdiri dari: 1. Kalimat yang memperkenalkan istilah – istilah yang merujuk kepada konsep – konsep dasar teori itu, 2. Kalimat – kalimat yang menghubungkan konsep – konsep dasar itu satu sama lain, dan 3. Kalimat – kalimat yang menghubungkan beberapa statmen teoritis itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empiris (yaitu hipotesa)".<sup>7</sup> Jadi teori di gunakan untuk menghubungkan suatu masalah dengan pendekatan yang ada sehingga dapat tercapai suatu solusi berdasarkan pendekatan yang digunakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori strategi untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

#### **- Teori Strategi :**

Untuk menyelesaikan persoalan strategi Rusia menghadapi embargo ekonomi AS dalam khusus Krimea tahun 2014 ini penulis menggunakan teori strategi. Strategi dalam politik luar negeri merupakan sebuah perencanaan yang di

---

<sup>6</sup> Scott Bruchill – Andrew Linklater, New Yorks: ST Martin's Perss, INC., 1996, hlm 11

<sup>7</sup> Gravin McCain dan Erwin Segal, The Game of Science, Brooks/Cole, 1993

buat oleh para pembuat keputusan guna mencapai kepentingan nasionalnya dengan di barengi usaha mencegah negara lain menghalai pencapaian kepentingan nasionalnya tersebut. Teori strategis akan dinilai berhasil atau pun gagal bila mampu membantu pembuat keputusan merumuskan sebuah strategi guna memenuhi kepentingan nasionalnya tersebut.

John P Lovell membagi strategi atas dua komponen yaitu komponen ofensif (bentuk untuk mendapatkan perolehan dan keuntungan) dan komponen defensif (bentuk untuk mencegah kehilangan atau kerugian).

Pembentukan strategi dalam politik luar negeri menggunakan pertimbangan – pertimbangan yang matang, dalam menentukan strategi hendaknya pembuat keputusan terlebih dahulu mengetahui sasaran dan tujuan yang ingin di capai. Maka strategi pada dasarnya merupakan sebuah proses rasional, yang artinya dalam pengambilan keputusan pemimpin diasumsikan sebagai actor yang bernalar, yang bertindak sesuai dengan perhitungan yang matang.

Teori strategi didasarkan atas pertimbangan pembuat keputusan dalam rangka memperhitungkan untung dan rugi dalam pencapaian tujuan strategi itu sendiri.<sup>8</sup> Serta menurut John P. Lovell, strategi adalah serangkaian langkah - langkah atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-untungan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mohtar Mas' oed, "Studi Hubungan-Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi" , Pusat antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 90

<sup>9</sup> Mohtar Mas' oed, Op. Cit, hal 92



Pembentukan teori strategis pada hakikatnya pasti berasumsi kepada tiga hal berikut ini, yaitu :

- a. Perilaku politik luar-negeri suatu negara-bangsa pasti diarahkan sebagai langkah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan kepentingan tersebut.
- b. Para pembuat keputusan selalu berusaha memaksimalkan perolehan bagi negara bangsanya dengan menelaah berbagai alternatif tindakan yang masing-masing dinilai berdasarkan analisis biaya dan hasil.
- c. Dalam dunia ini saling bergantung sehingga keputusan harus memperhitungkan tujuan dan strategi negara-bangsa yang lainnya.

Dengan kata lain negara akan berusaha untuk meraih kepentingan nasionalnya melalui kebijakan luar negerinya, dengan didasarkan atas strategi – strategi yang sudah di rancang sebelumnya oleh para pembuat keputusan di negara tersebut. Para pembuat tentunya akan membentuk strategi yang menguntungkan bagi negaranya.

Proses referendum Krimea pada yang dilaksanakan pada Februari tahun 2014 tersebut menghasilkan keputusan Krimea bergabung kedalam kedaulatan Rusia, dengan perolehan suara sebesar 70 persen warga Krimea ingin bergabung dengan Rusia, dan 11 persen lainnya menginginkan tetap bergabungkedalam ke dalam kedaulatan Ukraina. Namuan hasil referendum tersebut tidak diakui oleh dunia internasional, malah justru menuai banyak sanksi, salah satunya embargo Amerika Serikat kepada Rusia maupun Krimea. Sanksi yang di jatuhkan oleh Amerika Serikat bersama sekutunya tersebut sontak melemahkan perekonomian Rusia, di buktikan dengan rontoknya nilai dolar akibat embargo tersebut.

Pemerintah Rusia dengan pertimbangan yang matang dan dalam situasi yang kompetitif tersebut dipaksa untuk membentuk suatu strategi guna menyelamatkan perekonomian Rusia karena untuk terlepas dari embargo yang di berikan oleh Amerika Serikat tersebut Rusia diharuskan untuk tidak campur tangan dalam masalah Krimea, sesuai ketentuan embargo yang mana dapat di cabut bila negara penerima embargo bertindak sesuai yang diinginkan negara pemberi embargo.

#### **D. Hipotesa :**

Melalui masalah yang dilihat menggunakan teori strategi diatas, maka dapat ditarik jawaban sementara dari strategi Rusia menghadapi embargo AS pasca referendum Krimea tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Strategi Rusia menghadapi embargo AS adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan negara yang tidak turut serta memberikan sanksi kepada Rusia, kerjasama yang dilakukan oleh Rusia tersebut pun memutuskan untuk menggunakan mata uang nasional negara tersebut dalam proses transaksinya.

#### **E. Jangkauan Penelitian :**

Jangkauan penelitian dimulai sejak krisis Krimea memanans dengan tergulingnya Presiden Victor Yanukovych tahun 2014 yang kemudian berujung tuntutan rakyat Krimea untuk dilakukannya referendum, yang mana hasil dari referendum tersebut memutuskan Krimea bergabung kedalam kedaulatan Rusia, namun hasil referendum tersebut dinilai tidak sah oleh dunia internasional dan

menuai embargo dari AS, yang mengakibatkan anjloknya nilai Rubel terhadap dollar, hingga memaksa Rusia untuk membangun perekonomiannya kembali hingga saat ini meski di embargo oleh AS.

#### **F. Tujuan Penelitian :**

Adapun tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Penulisan ini sebagai tugas akhir kuliah dan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Hubungan Internasional. Selain itu juga sebagai pembanding bahan bacaan dan karya ilmiah lainnya.
2. Penulis ingin memberikan gambaran mengenai bagaimana terjadinya konflik di Krimea, yang pada akhirnya berujung di berlakukannya embargo oleh Amerika Serikat kepada Rusia.
3. Terakhir melalup penelitian ini penulis ingin memberikan penjelasam mengenai respon – respon yang dilakukan oleh Rusia dalam menanggapi sanksi – sanksi dari pihak Amerika Serikat tersebut.

#### **G. Metode Penelitian :**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka, dimana penulis mengumpulakna berbagai macam sumber bacaan yang ada, baik melalui refrensi buku, koran, journal maupun mencari data melalui internet. Serta dengan mengembangkan pemikiran terkait topic ini melalui diskusi dengan dosen – dosen.

## **H. Sistematika Penulisan :**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang ; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teoritik, Hipotesa, Jangkauan penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II. KRISI KRIMEA**

Bab ini menjelaskan mengenai keterlibatan Rusia dalam krisis di Krimea tahun 2014, yang kemudina oleh penulis dituangkan dalam berberapa sub bab, diantaranya: Profil Krimea, Sejarah Hubungan Rusia dan Krimea, Krisis di Krimea Tahun 2014, Pendudukan Rusia Atas Wilayah Krimea, dan Intervensi Amerika Serikat dalam Krisis Krimea.

### **BAB III. EMBARGO AS KEPADA RUSIA**

Bab ini menjelaskan mengenai bentuk embargo yang di berikan oleh Amerika Serikat kepada Rusia sebagai respon atas hasil referendum Krimea. Hal tersebu akan di jelaskan oleh penulis dalam berbagai sub bab, diantaranya sebagai berikut: Pengertian Embargo, Aneksasi Rusia Terhadap Krimea, dan Embargo AS pada Rusia.

#### BAB IV. STRATEGI RUSIA MENGHADAPI EMBARGO AS

Bab ini menjelaskan mengenai respon yang diambil Rusia pasca di berlakukannya embargo oleh Amerika Serikat, respon tersebut dalam bentuk kebijakan nasional dan dalam bentuk kerjasama. Penulis menjelaskannya melalui sub bab berikut : Kondisi Perekonomian Rusia, Kebijakan Rusia Pada Sector Dalam Negerinya, dan Kerjasama Rusia Dengan Negara Lain.

#### BAB V. KESIMPULAN

Pada kesimpulan berisi jawaban dari pertanyaan yang diajukan penulis yaitu, strategi yang dilakukan oleh Rusia menghadap embargo Amerika Serikat pasca Krisis Krimea tahun 2014.